

TEKNOLOGI BARU DAN INTEGRITAS PERADILAN DI ASEAN

Perspektif peradilan tentang penggunaan, peluang, tantangan serta dampak teknologi terhadap supremasi hukum, akses terhadap keadilan dan administrasi pengadilan

UNDP adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkemuka yang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan jaringan ahli dan mitra kami yang luas di 170 negara, kami membantu berbagai negara untuk membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini.

Pelajari lebih lanjut di undp.org atau ikuti di [@UNDP](https://twitter.com/UNDP).

Temuan, interpretasi, dan pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk UNDP, atau Negara Anggota PBB.

Hak Cipta © UNDP 2021

Seluruh hak dilindungi undang-undang.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs [Judicial Integrity Network in ASEAN](#).

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini ditugaskan pada tahun 2021 oleh UNDP Bangkok Regional Hub dalam kerangka kerja Proyek Regional tentang "Kualitas Peradilan untuk Memastikan Keadilan Bagi Semua: Jaringan Integritas Peradilan di ASEAN".

Penulis utama laporan ini adalah Sarah McCoubrey (CALIBRATE Solutions), Pakar Integritas Peradilan.

Pengembangan produk pengetahuan ini dikoordinasikan oleh Liviana Zorzi, Spesialis Proyek UNDP untuk Transparansi & Akuntabilitas. Tata letak dirancang oleh Pundaree Boonkerd.

Laporan ini mendapat masukan dari: Nicholas Booth, Ketua Tim Tata Kelola UNDP dan para anggota Kelompok Penasihat Judicial Integrity Network ASEAN:

- Hakim Shiranee Tilakawardane
- Lawrence Glanfield AM
- Dr Nihal Jayawickrama
- Yang Mulia Michael Kirby AC CMG
- Jennifer Marie
- Yang Mulia Murray Kellam AO QC

MITRA PENDONOR

Penelitian ini dimungkinkan berkat kontribusi dari Pemerintah Amerika Serikat, Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional (INL).



Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	3
Daftar Isi	4
Konteks.....	5
TENTANG INTEGRITAS PERADILAN DAN JIN ASEAN.....	6
Integritas Peradilan	7
Teknologi Untuk Pengadilan	9
PERCEPATAN MODERNISASI PENGADILAN AKIBAT PANDEMI	10
PROSES PERSIDANGAN VIRTUAL.....	10
Metodologi	12
Survei	13
RESPONDEN SURVEI	13
FORMULIR <i>ONLINE</i> DAN PENGARSIPAN ELEKTRONIK (<i>E-FILING</i>).....	14
MANAJEMEN PERKARA SECARA ELEKTRONIK/OTOMATIS.....	15
PERSIDANGAN VIRTUAL.....	18
KECERDASAN BUATAN (AI).....	21
TRANSPARANSI PENGADILAN.....	23
AKSES TERHADAP KEADILAN	24
PRIVASI/PERLINDUNGAN DATA	28
KOMENTAR UMUM.....	28
Kesimpulan	30

Konteks

Sistem peradilan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Teknologi adalah pendorong perubahan ini dan alat untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Proses dan cara berkomunikasi yang baru dapat mengatasi kesenjangan sosial dan membuat proses hukum tersedia bagi lebih banyak orang, dalam lebih banyak bahasa dan dengan biaya yang lebih rendah.

Namun, teknologi itu sendiri berdampak pada hak-hak dan perlindungan masyarakat dan tidak tersedia secara seragam di seluruh komunitas lokal atau global. Ketika para aktor dalam sistem peradilan menavigasi tantangan yang dihadirkan oleh teknologi, supremasi hukum dan perlindungan hak harus tetap menjadi pusat pengambilan keputusan baik dalam kasus-kasus individu maupun dalam administrasi peradilan.

Ketika mempertimbangkan teknologi sektor peradilan, maka peradilan itu sendiri sebagai ahli dalam perlindungan hak merupakan pihak kunci dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan teknologi yang sedang berkembang.

Survei perspektif peradilan ini berusaha untuk memahami bagaimana teknologi saat ini digunakan oleh peradilan di ASEAN dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana sumber daya atau alat tambahan akan membantu para hakim untuk berpartisipasi dalam evolusi teknologi sistem peradilan.

Hakim adalah penjaga hak-hak individu pihak yang berperkara di ruang sidang mereka, sekaligus bertindak untuk melindungi integritas sistem peradilan

yang lebih luas. Integritas peradilan sangat penting bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan stabilitas proses dan institusi demokrasi, pasar ekonomi, dan hubungan global.

Hakim melindungi hak-hak semua pihak yang berperkara di pengadilan. Mereka melihat bagaimana perempuan, anak-anak dan anggota masyarakat yang rentan dikucilkan atau dirugikan.

Para hakim dapat memperbaiki ketidaksetaraan ini dalam kasus-kasus individual dan dapat membawa perspektif ini ke dalam diskusi sistemik mengenai diskriminasi gender, ras dan jenis diskriminasi lainnya. Perspektif yudisial ini sangat penting dalam perubahan hukum dan perubahan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan pengadilan.

Peradilan sering kali memiliki suara yang cukup besar dalam menentukan apakah dan bagaimana teknologi baru akan digunakan dalam proses hukum. Namun, hakim tidak selalu menerima pelatihan tentang cara kerja teknologi. Argumen efisiensi dan penghematan biaya sering kali mendorong adopsi teknis, dengan peradilan sebagai salah satu dari sedikit suara yang menyuarakan kekhawatiran mereka tentang hak asasi manusia, privasi, atau keadilan prosedural. Di lain waktu, hakim yang tidak terbiasa dengan potensi teknologi baru mungkin menolak perubahan.

Hal ini dapat mengukuhkan sistem yang mempertahankan ketidaksetaraan dan rentan terhadap korupsi atau penyalahgunaan. Tekanan-tekanan ini dapat menempatkan hakim pada posisi yang sulit untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling

bersaing sembari memastikan bahwa perubahan sistem dapat memajukan perlindungan hak-hak dan supremasi hukum, dan bukan mengikisnya.

TENTANG INTEGRITAS PERADILAN DAN JIN ASEAN

Judicial Integrity Network ASEAN (JIN ASEAN) didirikan pada tahun 2018 sebagai jaringan para hakim yang terhubung satu sama lain di seluruh kawasan untuk

berbagi pengetahuan dan pendekatan untuk melindungi dan memperkuat integritas peradilan. Negara-negara anggota saat ini termasuk Indonesia, RDR Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Memperkuat integritas peradilan adalah perlindungan terhadap korupsi dan pengaruh yang tidak pantas dalam sistem peradilan.

Integritas Peradilan

Integritas peradilan (atau integritas yudisial) adalah konsep multi-segi yang mencakup perilaku dan praktik hakim serta struktur dan situasi tempat hakim bekerja. Integritas peradilan mencakup prinsip-prinsip yang memastikan lembaga-lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel sebagai komponen penting untuk mendorong tujuan SDG 16 yaitu masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, serta keadilan untuk semua.¹

Integritas peradilan adalah konsep yang luas yang mencakup sejumlah elemen kunci dalam peradilan untuk memastikan sistem peradilan yang kuat, adil, dan menghormati hak asasi manusia:

- Transparansi dalam pengambilan keputusan
- Transparansi dalam administrasi pengadilan
- Prediktabilitas jangka waktu perkara
- Akses yang sama tanpa memandang status, uang, atau identitas
- Perlakuan yang sama tanpa memandang status, uang, atau identitas
- Mekanisme untuk mencegah penyuapan
- Mekanisme untuk mencegah ancaman berbasis gender atau identitas
- Proses hukum yang adil
- Independensi peradilan
- Pemisahan peran dan lembaga politik dan yudisial

Dalam konteks teknologi baru, terdapat implikasi untuk masing-masing elemen tersebut.

Pada tahun 2008, Prinsip-prinsip Bangalore dikembangkan, yang mengartikulasikan enam nilai untuk memperkuat lembaga peradilan sebagai "landasan demokrasi dan supremasi hukum" yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari "setiap pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan berdasarkan hukum."²

Prinsip-prinsip ini menguraikan perlindungan yang termasuk dalam banyak instrumen hak asasi manusia internasional maupun domestik, dengan mengacu pada Pasal 10 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948:

Setiap orang berhak atas kesetaraan penuh untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak dan kewajibannya dan atas segala tuntutan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Prinsip-Prinsip Bangalore mencakup enam nilai:

Nilai 1: **Independensi**: Independensi peradilan merupakan prasyarat bagi supremasi hukum dan jaminan mendasar dari pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjunjung tinggi dan menjadi teladan bagi independensi peradilan baik dalam aspek individu maupun institusional.

¹ 2030 Agenda for Sustainable Development, <https://sdgs.un.org/2030agenda>

² Preamble, Prinsip-prinsip Bangalore. Diakses pada [UNODC Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct](#)

Nilai 2: **Ketidakberpihakan:** Ketidakberpihakan sangat penting untuk menjalankan tugas peradilan dengan baik. Hal ini tidak hanya berlaku untuk keputusan itu sendiri tetapi juga untuk proses di mana keputusan tersebut dibuat.

Nilai 3: **Integritas:** Integritas sangat penting bagi pelaksanaan tugas peradilan yang benar.

Nilai 4: **Kepatutan:** Kepatutan, dan penampilan yang patut, sangat penting dalam pelaksanaan semua kegiatan hakim.

Nilai 5: **Kesetaraan:** Memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang di pengadilan adalah hal yang penting bagi kinerja yang semestinya dari jabatan peradilan.

Nilai 6: **Kompetensi dan Ketekunan:** Kompetensi dan ketekunan adalah prasyarat untuk kinerja yang baik dari jabatan peradilan.

Pada tahun 2018, JIN ASEAN mengembangkan [Judicial Integrity Checklist](#) (Daftar Periksa Integritas Peradilan) dan pada tahun 2020 memperbaruinya untuk diintegrasikan dengan Kerangka Kerja Internasional untuk Keunggulan Pengadilan (International Framework for Court Excellence). IFCE telah memasukkan Daftar Periksa tersebut ke dalam model globalnya untuk menilai dan memantau keunggulan pengadilan pada tahun [2020](#).³

United Nations Development Program (UNDP), melalui JIN ASEAN terus berbagi pengetahuan dan alat untuk memperkuat integritas peradilan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk

mempromosikan keunggulan pengadilan. Dengan cara ini, para hakim juga dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam melawan korupsi, memajukan komitmen masing-masing negara untuk mengimplementasikan Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC).

Konvensi yang mulai berlaku pada tahun 2005 ini mengidentifikasi lembaga peradilan sebagai lembaga yang penting untuk mencegah dan melawan korupsi.⁴ Pasal 11 mewajibkan setiap negara anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk

1. memperkuat integritas di antara anggota lembaga peradilan dan kejaksaan, dan
2. mencegah kesempatan untuk korupsi di antara anggota lembaga peradilan dan penuntutan.

Penelitian ini dan perangkat terkait yang berkaitan dengan teknologi yang sedang berkembang merupakan salah satu cara bagi para hakim di jaringan JIN ASEAN untuk terlibat dan belajar satu sama lain serta membangun kapasitas hakim di seluruh wilayah seiring dengan perkembangan administrasi peradilan yang terus berkembang.

Isu-isu yang dihadirkan oleh teknologi baru bersinggungan dengan kewajiban hakim dalam kaitannya dengan Prinsip-Prinsip Bangalore (Nilai 2: Ketidakberpihakan, Nilai 3: Integritas, Nilai 5: Kesetaraan, Nilai 6: Kompetensi dan ketekunan) dan aspek-aspek kunci dari Daftar Periksa Integritas Peradilan.

³ [International Consortium for Court Excellence](#), Kuesioner Penilaian Mandiri Tentang Keunggulan Pengadilan.

⁴ UNODC, [Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa](#).

Teknologi Untuk Pengadilan

E-justice adalah istilah umum yang mencakup segala upaya untuk mengelola, memberikan, memperkuat, atau memantau layanan peradilan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti pengadilan dan pemerintah, individu seperti pengacara dan pembela hak asasi manusia, serta entitas swasta dan masyarakat sipil seperti penyedia teknologi dan mitra masyarakat.

E-justice secara luas mencakup semua jenis teknologi digital mulai dari manajemen kasus yang kompleks atau aplikasi inovatif hingga teknologi informasi dan penggunaan komunikasi *online*. Hal ini mencakup alat dan proses yang digunakan oleh para profesional di sektor peradilan dan yang digunakan oleh pengguna pengadilan dan media.

Inisiatif *e-justice* meliputi strategi, proses teknis serta penyusunan ulang hal-hal teknis, otomatisasi, pengumpulan data, integrasi sistem serta penyelesaian sengketa secara *online*, *e-filing*, proses pengadilan jarak jauh, dan teknologi yang digunakan untuk mendigitalkan, menyimpan, dan menyediakan akses ke dokumen dan bukti hukum.

Digitalisasi adalah proses mengubah proses dan konten yang ada dari format analog menjadi format digital. Hal ini termasuk mengembangkan formulir dan portal *online* untuk mengirimkan dokumen atau mengakses keputusan untuk membuat proses pengadilan tatap muka yang sudah ada menjadi tersedia secara *online*.

Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses peradilan dan model bisnis. Hal ini mencakup

teknologi digital yang memungkinkan cara-cara yang sama sekali baru dalam memberikan atau mengelola keadilan.

Transformasi Digital adalah perubahan budaya dalam sistem dan institusi melalui teknologi digital. Hal ini mencakup desain dan teknologi yang berpusat pada pengguna yang memungkinkan pemberi kerja dan pengguna untuk bekerja secara berbeda.

Transformasi digital dapat memfasilitasi pergeseran budaya hukum dan peradilan menuju budaya yang lebih akuntabel, transparan, dan mudah diakses.

Pengadilan di seluruh dunia terlibat dalam berbagai proyek dan program jangka panjang, bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai mitra dan donor, untuk memodernisasi sistem peradilan masing-masing, termasuk:

- sistem manajemen perkara,
- persidangan virtual,
- pengarsipan dan penyimpanan dokumen dan bukti secara elektronik,
- komunikasi asinkron antara pihak-pihak yang berperkara dan dengan pengadilan,
- penjadwalan elektronik, dan
- pengenalan alat baru seperti penyelesaian sengketa *online*, dan alat prediksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI).

Beberapa elemen dari proyek-proyek ini diperkenalkan atau dipercepat karena pandemi COVID-19 dan karantina yang mengikutinya, yang mengharuskan pengadilan untuk beroperasi secara virtual

dan merestrukturisasi proses pengadilan sebagai transaksi *online*.

Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi putusan pengadilan, meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas, dan memungkinkan pengawasan publik yang lebih besar terhadap sistem. Perlindungan dasar dari aturan hukum yang dibangun ke dalam sistem peradilan dapat dikompromikan, secara tidak sengaja, oleh pengembang teknologi sektor swasta. Ketika perubahan diperkenalkan, pengawasan yang berkelanjutan terhadap dampak perubahan teknologi pada proses peradilan akan menjadi sangat penting.

PERCEPATAN MODERNISASI PENGADILAN AKIBAT PANDEMI

Di sektor hukum yang secara historis konservatif, pandemi telah mempercepat adopsi teknologi baru. Platform *online*, penggunaan proses baru, dan otomatisasi berbagai tahapan proses telah lama diusulkan, tetapi sering kali ditolak atau ditunda karena pengadilan lebih berfokus pada pemeliharaan proses yang ada. Meskipun termotivasi oleh perhatian yang cermat terhadap hak-hak individu, pendekatan yang hati-hati ini telah mengakibatkan sistem peradilan menjadi salah satu yang terakhir mengadopsi teknologi baru di negara-negara di seluruh dunia.

Ketika karantina wilayah terkait pandemi dimulai, pengadilan, administrator pengadilan, dan hakim bergerak cepat untuk memodifikasi proses, menerima dokumen pengadilan secara elektronik, mengadakan sidang secara *online*, dan berkomunikasi dengan profesional hukum dan masyarakat dengan cara-cara baru.

Teknologi-teknologi ini memiliki dampak yang tidak merata, misalnya perempuan

yang menghadapi kekerasan di rumah atau di masyarakat mungkin diancam atau dipaksa untuk bersaksi; pihak berperkara tinggal di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi pengadilan mungkin akan mengabaikan kasus mereka; orang-orang yang tidak memiliki teknologi atau uang mungkin akan dikecualikan.

Ketika masyarakat beralih dari adaptasi berbasis krisis ke pelaksanaan *online* dan digital secara permanen, sangat penting untuk menilai dengan cermat aturan hukum dan implikasi akses terhadap keadilan dari teknologi yang muncul, termasuk teknologi yang diadopsi pada puncak pandemi.

Eksperimen pandemi dalam pelaksanaan *online* atau digital telah menciptakan keinginan untuk pendekatan yang lebih berbasis teknologi terhadap keadilan dan telah menunjukkan potensi untuk menyeimbangkan aksesibilitas dan ketegasan peradilan.

Pandemi telah menciptakan peluang untuk membuat langkah maju yang signifikan dalam modernisasi pengadilan dengan membangun eksperimen yang dilakukan pada tahun 2020, yang sekarang diinformasikan oleh aktor pengadilan yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam menilai teknologi baru di pengadilan mereka.

PROSES PERSIDANGAN VIRTUAL

Sidang atau proses pengadilan virtual, juga disebut sebagai *e-court*, pengadilan jarak jauh, atau sidang jarak jauh termasuk sidang video dan akses video ke pengadilan langsung. Sidang jarak jauh mungkin tersedia untuk semua pihak dalam kasus atau hanya untuk beberapa peserta seperti pihak yang berperkara yang dipenjara, saksi yang rentan, dan ahli.

Elemen-elemen dari proses pengadilan virtual telah ada di pengadilan di seluruh dunia selama beberapa tahun termasuk:

- kehadiran melalui video atau telepon di pengadilan oleh pihak yang berperkara yang dipenjara, dari penjara
- kehadiran melalui video di pengadilan oleh saksi yang rentan, dari lokasi lain baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan
- kehadiran melalui video atau telepon oleh saksi ahli di yurisdiksi lain
- kehadiran melalui telepon oleh pihak yang berperkara atau pengacara untuk mosi, masalah pra-pengadilan dan diskusi penjadwalan
- kehadiran melalui video atau telepon oleh pihak yang berperkara di mana cuaca, kesehatan, atau jarak tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung

Pandemi COVID-19 dan pembatasan pergerakan yang diakibatkannya telah menyoroti dan mempercepat kebutuhan akan pengadilan virtual. Pengadilan virtual yang sepenuhnya, di mana tidak ada seorang pun, termasuk hakim, yang hadir di gedung pengadilan, menjadi penting untuk pengoperasian sistem peradilan di banyak negara selama pandemi. Hal ini menggeser fokus dari konsep tradisional dari kehadiran secara virtual oleh satu individu di ruang sidang yang dihadiri secara langsung menjadi model pengadilan yang sepenuhnya virtual. Kekhawatiran tradisional sehubungan dengan proses pengadilan virtual, termasuk keamanan teknologi dan kualitas kesaksian dalam pengaturan *online*, kian diuji ketika pengadilan dengan cepat mengadopsi teknologi yang ada untuk menghindari penundaan dalam memberikan keadilan.

Metodologi

Pada bulan Februari 2021, JIN ASEAN memprakarsai penelitian tentang dampak teknologi yang sedang berkembang terhadap integritas peradilan. Penelitian ini memiliki dua aliran penyelidikan yang digabungkan untuk menghasilkan laporan ini. Tinjauan terhadap laporan sektoral dan akademis tentang teknologi sektor peradilan yang sedang berkembang telah menginformasikan berbagai teknologi yang dipertimbangkan dalam laporan ini.

Tanggapan berbasis teknologi terhadap pandemi yang diadopsi oleh negara-negara anggota JIN ASEAN juga ditinjau, berdasarkan kontribusi masing-masing negara terhadap webinar JIN ASEAN berjudul *Justice in the Time of COVID-19* dan berbagi pengetahuan. Contoh-contoh perubahan teknologi baru dan yang diusulkan yang dikumpulkan melalui penelitian ini menghasilkan pemahaman tentang tantangan yang dapat diperkirakan bagi para pelaku sistem peradilan.

Sebuah survei *online* disiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diinformasikan oleh penelitian sektor ini, untuk menanyakan tentang penggunaan teknologi ini di pengadilan ASEAN saat ini.

Survei ini, yang dibagikan kepada masing-masing hakim di setiap negara anggota JIN ASEAN, mengundang para hakim untuk mengidentifikasi teknologi yang mereka gunakan di pengadilan mereka dan merefleksikan dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing teknologi tersebut terhadap transparansi dan aksesibilitas peradilan.

Perspektif individu ini memberikan penilaian pragmatis tentang dampak teknologi ini di negara-negara tertentu, dan di ruang pengadilan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, hakim dari pengadilan yang sama melaporkan memiliki akses ke teknologi yang berbeda, yang menunjukkan tantangan implementasi skala besar dan kebutuhan yang berbeda dari pengadilan yang mengadili berbagai jenis kasus.

Perspektif langsung ini mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk menangani integritas peradilan dengan lebih baik dalam evolusi teknologi pengadilan dan akan menginformasikan pengembangan alat baru untuk peradilan.

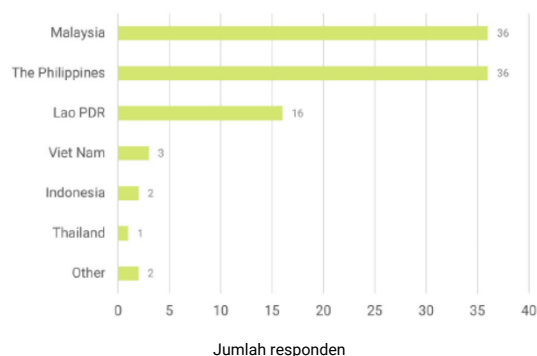
Survei

JIN ASEAN meminta tanggapan survei dari para hakim di wilayah ASEAN antara bulan April dan Juni 2021. Survei *online* ini ditawarkan dalam bahasa Inggris, Vietnam, dan Laos.

RESPONDEN SURVEI

Seratus satu tanggapan diterima dari keenam negara anggota JIN ASEAN. Tanggapan berasal dari hakim di berbagai tingkat pengadilan dan dalam posisi yang berbeda, termasuk administrator pengadilan.

Negara asal para responden



Nama Pengadilan	Respons
Indonesia	
Pengadilan Negeri	1
Mahkamah Agung	1
Laos	
Mahkamah Agung Rakyat	16
Malaysia	
Pengadilan Banding	2
Pengadilan Federal	1
Pengadilan Tinggi	14
Pengadilan Magistrat	7
Pengadilan Sidang / Kota	12
Thailand	
Pengadilan Negeri	1
Filipina	
Pengadilan Banding	6
Pengadilan Kota	10
Pengadilan Daerah	20
Vietnam	
Mahkamah Agung Rakyat	2
Pengadilan Daerah	2
Pengadilan Provinsi	1

Peran	Respons
Indonesia	
Hakim	1
Tim Pembaruan Peradilan (<i>Judicial Reform</i>)	1
Laos	
Hakim Ketua	1
Hakim	12
Administrator Pengadilan	2
Lain-lain	1
Malaysia	
Hakim	27
Wakil Panitera	4
Hakim	4
Komisaris Yudisial	1
Pejabat Yudisial	1
Thailand	
Hakim	1
Filipina	
Hakim	29
Panitera Pengadilan	6
Petugas Pencatatan	1
Vietnam	
Hakim	5

Jenis Teknologi	Pengguna (%)
<i>E-filing</i>	72
Kehadiran melalui video untuk pengacara	69
Manajemen kasus secara <i>online</i>	66
Formulir <i>online</i>	46
Kehadiran melalui video untuk saksi ahli	42
Kehadiran melalui video untuk masyarakat umum	41
Pelaporan pengadilan secara virtual	20
Alat penelitian hukum otomatis	17
Templat putusan yang telah diisi secara otomatis	14
Portal <i>e-discovery</i> daring	8
Kecerdasan buatan (AI) untuk melengkapi atau memprediksi teks	7
Pengungkapan (<i>disclosure</i>) secara daring	6
Surat Penangkapan Elektronik dan Surat Panggilan Elektronik	2
Putusan otomatis menggunakan AI	1
Penyelesaian sengketa secara daring	1
Lain-lain	2

Pengamatan yudisial dan pertimbangan tentang teknologi tersebut akan dieksplorasi berdasarkan kelompok-kelompok tematik.

FORMULIR *ONLINE* DAN PENGARSIPAN ELEKTRONIK (*E-FILING*)

Banyak pengadilan menyediakan formulir yang dapat diisi secara *online*, dirancang untuk mempermudah menemukan dan menggunakan formulir pengadilan. Beberapa pengadilan juga memiliki fungsi *e-filing* yang memungkinkan pengguna untuk 'mengirimkan' formulir *online* secara langsung, sementara yang lain mengharuskan formulir dikirim melalui email atau diantarkan ke kantor pengadilan. *E-filing* adalah bentuk teknologi yang paling umum digunakan di pengadilan-pengadilan di wilayah ASEAN dengan 72% penggunaan. Responden diminta untuk memilih jenis pengajuan yang diizinkan melalui platform *e-filing*.

Para hakim mengungkapkan beberapa kekhawatiran tentang risiko penipuan dan serangan siber dalam sistem *e-filing* dan kekhawatiran yang cukup besar tentang keamanan data pribadi pihak yang berperkara yang diserahkan melalui portal *online*. Beberapa hakim mengakui bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang cukup untuk mengotentikasi bukti dokumen yang diserahkan secara *online*. Beberapa hakim lainnya menyatakan bahwa proses pengadilan dalam menguji kebenaran bukti, termasuk dokumen yang diserahkan secara elektronik, sudah cukup untuk mengidentifikasi dokumen palsu dan menjaga transparansi peradilan.

Para hakim mengutip perlindungan kata sandi dan akses terkontrol untuk pihak yang berperkara dan pengacara sebagai perlindungan dalam platform *e-filing*, mengakui kepercayaan pengacara yang menyerahkan dokumen. Yang lain merujuk pada kode verifikasi dalam proses pengadilan untuk mengotentikasi salinan elektronik.

Formulir-formulir pengadilan yang diserahkan secara elektronik	64%
Argumen yang disampaikan secara elektronik	65%
Bukti yang diserahkan secara elektronik oleh para pihak	49%
Bukti yang diserahkan secara elektronik oleh para ahli	26%
Bukti yang diserahkan secara elektronik oleh polisi	30%

Komentar Responden Survei:

Tidak ada masalah dalam hal keamanan dokumen, keandalan dan transparansi peradilan karena seluruh sistem dijamin oleh pemerintah dan dipelihara dengan baik oleh administrator yang bertanggung jawab.

Alat hanyalah bantuan tambahan yang lebih efektif dalam pelaksanaan sidang virtual tetapi tidak menggantikan pengarsipan atau penyerahan dokumen yang sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara yang masih harus dilakukan oleh para pihak. Hal ini dapat dianggap hanya sebagai "salinan awal" dari dokumen/formulir yang akan diajukan.

Kami belum memiliki teknologi untuk mendeteksi keaslian dokumen yang dikirimkan secara elektronik.

Kami memiliki ketentuan dalam hukum untuk mencakup setiap aspek keamanan, keandalan, atau transparansi peradilan terkait dokumen online.

MANAJEMEN PERKARA SECARA ELEKTRONIK/ OTOMATIS

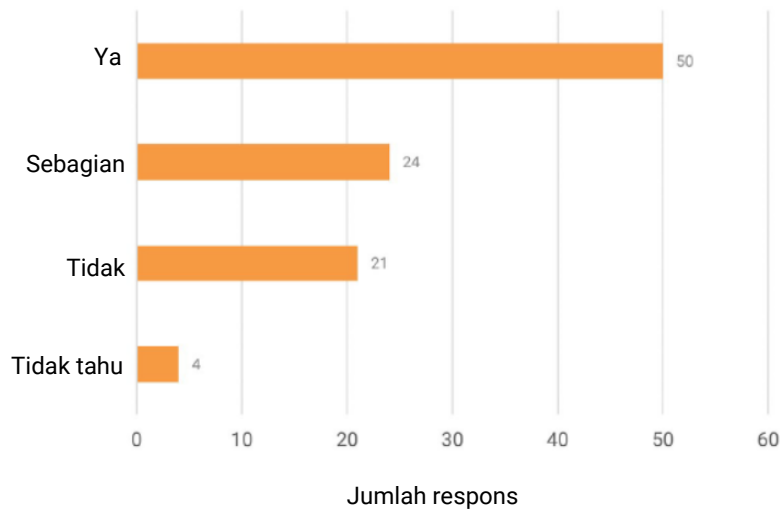
Tujuh puluh empat persen responden melaporkan menggunakan sistem manajemen perkara elektronik atau otomatis, baik sebagian atau secara keseluruhan untuk manajemen perkara di pengadilan mereka. Mereka menggambarkan kemudahan penggunaan dengan hanya 13% responden yang menggambarkan sistem tersebut sulit atau sangat sulit untuk digunakan.

Para hakim menjawab pertanyaan tentang keamanan sistem manajemen perkara dan dukungannya terhadap proses pengambilan keputusan pengadilan. Sebagian besar merasa bahwa sistem ini aman dan menyediakan sebagian besar atau semua informasi yang mereka butuhkan.

Mereka yang mengidentifikasi keterbatasan sistem menyebutkan adanya kesenjangan dalam berkas perkara, masalah ketika perkara diajukan banding atau ketika lebih dari satu hakim membutuhkan akses ke berkas perkara. Yang lain mencatat bahwa sistem manajemen perkara tidak diperbarui dengan cukup cepat dan bahwa perlindungan keamanan dan kerahasiaan dapat menghalangi akses peradilan terhadap berkas perkara yang lengkap.

Salah satu responden menyatakan bahwa manajemen perkara *online* yang digunakan selama pandemi tidak diatur dengan cara yang logis dan tidak dapat diterapkan dalam jangka panjang.

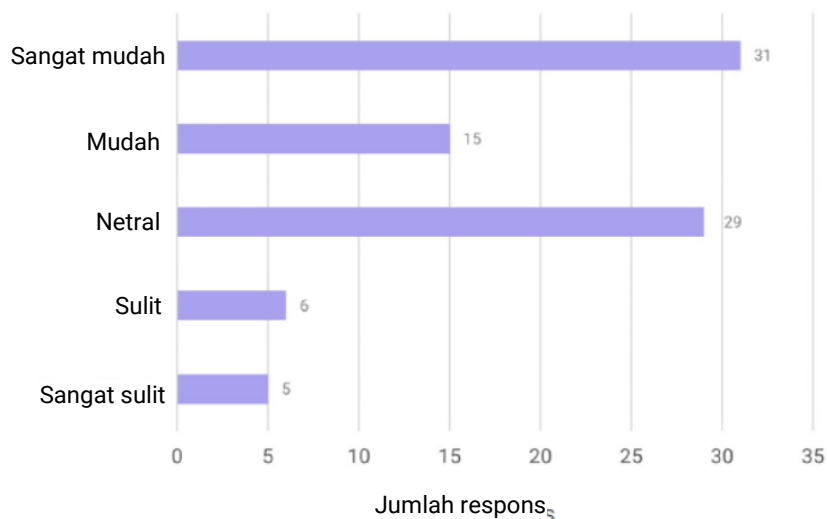
Apakah pengadilan Anda menggunakan manajemen perkara secara elektronik maupun otomatis?



Ketika ditanya bagaimana sistem manajemen perkara elektronik mempengaruhi integritas peradilan, 27% responden menyatakan tidak ada dampaknya. Dampak negatif lain yang teridentifikasi terkait dengan keamanan berkas dan kesulitan untuk mengontrol siapa yang mengakses berkas perkara, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap putusan.

Mayoritas responden berpendapat bahwa sistem manajemen perkara elektronik meningkatkan integritas peradilan dengan meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hakim memiliki akses ke semua berkas yang diperlukan, bahkan selama penutupan pengadilan.

Seberapa mudah atau sulitkah bagi Anda untuk mengelola kemajuan kasus menggunakan manajemen kasus otomatis?



Komentar Responden Survei:

Manajemen perkara secara elektronik mempercepat keputusan hakim untuk memastikan alasan penundaan disposisi perkara.

Manajemen perkara elektronik meningkatkan integritas peradilan karena semua berkas perkara yang diajukan di CMS diautentikasi dan diberi cap waktu.

Manajemen perkara elektronik mendorong transparansi dan menghindari interaksi dengan personil pengadilan, pihak-pihak dan pengacara yang dapat menjadi kesempatan untuk melakukan penyimpangan.

Hal ini mempengaruhi integritas dengan cara yang positif. Segala sesuatu harus dicatat secara akurat dalam sistem, dan hanya dapat diubah oleh orang yang berwenang.

Hal ini berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Menghemat banyak waktu masyarakat dan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan setiap kali kasusnya ditetapkan untuk disidangkan dan hanya akan hadir jika hakim memintanya.

Sebaiknya para hakim yang tidak terkait dengan kasus tersebut tidak mengakses informasi orang lain.

Karena tidak ada tampilan fisik, maka kami tidak dapat memastikan apakah orang yang masuk ke sistem dan mengakses data adalah orang yang memiliki wewenang untuk menggunakannya atau tidak.

Memperkuat tanggung jawab masing-masing Hakim.

PERSIDANGAN VIRTUAL

Para responden menyebutkan berbagai jenis persidangan virtual. Beberapa responden melaporkan bahwa sidang virtual tidak diizinkan oleh undang-undang, sementara yang lain menggambarkan sidang daring terkait pandemi dan yang lain mengakses sidang daring sebelum pandemi.

Mereka yang berpartisipasi dalam persidangan virtual diminta untuk memberikan komentar tentang jenis platform yang mereka gunakan dan bagaimana persidangan virtual dibandingkan dengan pengalaman mereka memimpin persidangan secara langsung. Responden juga membagikan masukan yang mereka terima dari pihak yang berperkara.

Keluhan yang paling sering dilaporkan oleh para pihak yaitu terkait dengan ketersediaan dan stabilitas internet, juga ketersediaan teknologi.

Para pihak di daerah pedesaan tidak memiliki akses pribadi atau komunitas ke internet yang memadai untuk berpartisipasi dalam sidang *online*. Banyak pengacara tidak memiliki internet di kantor mereka, sehingga menciptakan kesenjangan antara para pihak dalam sidang virtual. Banyak hakim mendengar keluhan tentang kualitas audio dan video selama persidangan.

Sidang virtual selama pandemi mungkin memerlukan konektivitas berbasis rumah untuk para hakim, pengacara, dan staf pengadilan. Dalam kasus lain, para hakim membayar sendiri biaya penggunaan internet atau langganan platform video.

Saya pernah menggunakan platform yang dikembangkan pengadilan

36 (42.9%)

Saya pernah menggunakan platform sektor swasta (Zoom, Teams, dll.) untuk sidang virtual

68 (81.0%)

Sidang virtual dijadwalkan untuk jumlah waktu pengadilan yang sama dengan sidang tatap muka

49 (58.3%)

Sidang virtual dijadwalkan untuk jumlah waktu pengadilan yang lebih lama dibandingkan sidang tatap muka

18 (21.4%)

Sidang virtual dijadwalkan untuk jumlah waktu pengadilan yang lebih singkat dibandingkan sidang tatap muka

18 (21.4%)

Saya memiliki jumlah waktu yang sama untuk mempersiapkan sidang virtual dibandingkan sidang tatap muka

40 (47.6%)

Saya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan sidang virtual

44 (52.4%)

Sidang virtual direkam oleh pengadilan

66 (78.6%)

Sidang virtual boleh direkam oleh para pihak

6 (7.1%)

Platform teknologi membutuhkan staf pendukung tambahan atau staf yang berbeda dari sidang tatap muka

35 (41.7%)

Saya pernah mendapat keluhan dari suatu pihak terkait dengan teknologi, aksesibilitas, maupun biaya untuk menghadiri sidang secara online

26 (31.0%)

Kesenjangan digital merugikan kelompok-kelompok rentan, termasuk pihak yang berada di daerah pedesaan, yang tidak memiliki akses terhadap teknologi, yang sudah lanjut usia, dan yang memiliki hambatan dalam hal literasi dan bahasa.

Para hakim melaporkan kesulitan dalam menilai kredibilitas atau melihat bukti, baik fisik maupun dokumenter, pada platform video. Pihak lain mengakui bahwa sulit mempersiapkan saksi untuk sidang virtual dan banyak yang bingung dengan teknologi dan prosesnya, sehingga membutuhkan dukungan teknologi dari staf pengadilan selama sidang.

Baik pihak-pihak yang berperkara maupun para hakim menyatakan keraguannya bahwa terdakwa akan diperlakukan dengan cara yang sama secara *online* seperti halnya secara langsung.

Ketika diminta untuk menjabarkan kehadiran berbasis video untuk pengguna pengadilan yang berbeda, para hakim membedakan antara kehadiran secara virtual untuk pengacara, publik/para pihak dan ahli.

Ketika ditanya tentang dampak persidangan virtual terhadap independensi peradilan, integritas, atau supremasi hukum, 45% hakim menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya dampak.

Kehadiran melalui video untuk pengacara	69%
Kehadiran melalui video untuk masyarakat umum	41%

Kehadiran melalui video untuk saksi ahli	42%
--	-----

Banyak responden menyatakan kekhawatiran tentang menilai independensi saksi atau memastikan bahwa saksi tidak diancam atau dilatih ketika bersaksi.

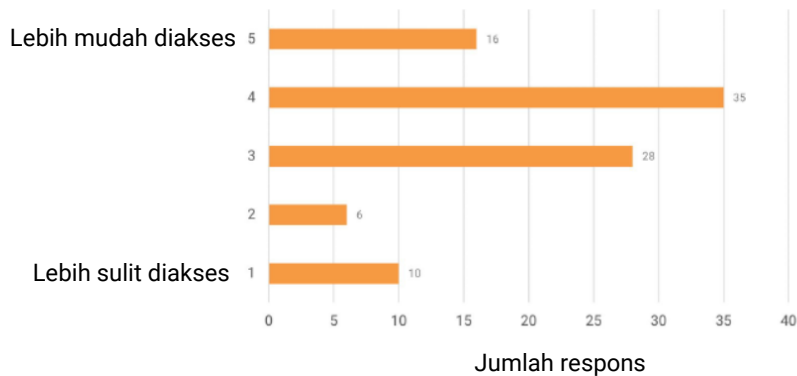
Para hakim menyatakan kekhawatiran mereka tentang siapa saja orang-orang yang hadir di dalam ruangan bersama para saksi dan visibilitas persidangan *online* bagi para pengamat, juga terjadinya perekaman secara diam-diam.

Responden lain menyatakan kekhawatiran terhadap prinsip peradilan terbuka yang menyatakan bahwa hak untuk mengkonfrontasi saksi dalam kasus pidana dibatasi secara *online*.

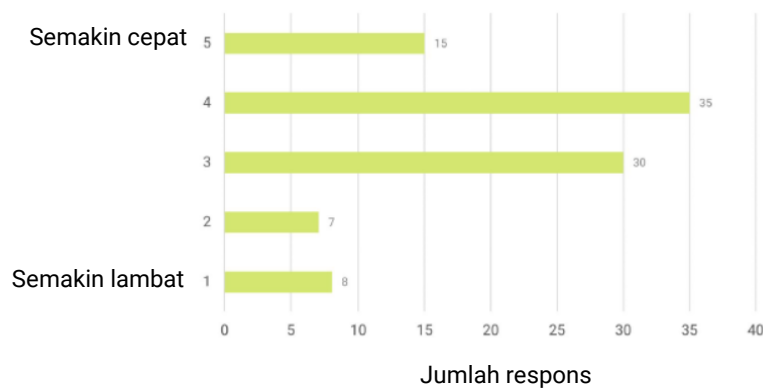
Formalitas ruang sidang disebut sebagai salah satu ciri khas proses pengadilan yang hilang dalam lingkungan *online*. Kesungguhan dan martabat persidangan berkurang, pengacara dan saksi berpakaian santai dan berperilaku dengan cara yang lebih santai, sehingga mengurangi pentingnya acara tersebut bagi pihak yang berperkara.

Terlepas dari kekhawatiran ini, para responden mengakui bahwa persidangan virtual telah memberikan akses ke proses pengadilan selama pandemi dan mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke kota atau sering datang ke pengadilan.

Bagaimana teknologi memengaruhi kemampuan pihak-pihak untuk berpartisipasi dari rumah atau dari lingkungan mereka?



Bagaimana teknologi memengaruhi kecepatan persidangan?



Komentar Responden Survei:

Berkurangnya interaksi manusia ketika sidang dilakukan (secara online).

Dalam kasus-kasus kriminal, sidang virtual bukanlah metode yang tepat karena saksi tidak dapat melihat dengan jelas foto atau label yang terpasang pada peralatan/objek apapun, misalnya label pada botol sampel urin dalam kasus narkoba, tulisandalam barang bukti/dokumen selamadalam persidangan ketika ditanyai oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum atau pembela.

Isu-isu yang diangkat hampir seluruhnya terkait denganhampir seluruhnya terkait dengan kurangnya pemahaman tentang teknologi.

Masalah dengan audio dan akses jaringan yang terbatas atau akses jaringan yang terbatas atau buruk yang mengganggu kehadiran secara virtual bagi para pihak.

Pihak yang berperkara sering bertanya kepada staf pengadilan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi, cara menginstal dan semua masalah yang terkait

Dalam semangat pelayanan publik, staf memberi dukungan teknologi untuk pihak yang berperkara dan bahkan untuk pengacara juga. Hal ini menambah banyak fungsi yang harus dilakukan oleh staf.

Kurangnya kesempatan bagi pengacara muda dan mahasiswa kepaniteraank untuk mengenal kesopanan pengadilan dan keterampilan advokasi.

Kekhawatiran tentang yurisdiksi jika hakim tidak berada di dalam yurisdiksi teritorialnya; kekhawatiran tentang tempat jika saksi bersaksi di luar negeri.

Teknologi harus disertakan dalam sidang pengadilan, seperti kasus perdagangan manusia, tuntutan hukum, dan kasus-kasus terkait teknologi lainnya.

Ketidakkampuan pengacara untuk memastikan bahwa saksi tidak dilatih dan kesulitan dalam menandai barang bukti.

KECERDASAN BUATAN (AI)

Ketika ditanya tentang penggunaan kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin di pengadilan mereka, 7% melaporkan menggunakan teknologi prediktif dalam menjatuhkan hukuman, 17% menggunakan alat penelitian otomatis yang mengandalkan algoritma, dan 14% menggunakan templat putusan yang telah diisi sebelumnya yang mungkin memiliki komponen pembelajaran mesin. AI dan pembelajaran mesin belum digunakan dalam manajemen kasus atau aspek lain dari administrasi pengadilan di wilayah ini.

Ketika ditanya tentang penggunaan data prediktif, para hakim mengidentifikasi data yang dihasilkan dan disediakan oleh pengadilan (9 tanggapan) dan dari para ahli dalam suatu kasus (3 tanggapan) dan dari sumber lain (4 tanggapan). Data ini digambarkan sangat membantu. Salah satu responden menggambarkan pembelajaran mesin dalam konteks penghukuman termasuk sistem sektor swasta yang menganalisis faktor-faktor penghukuman utama termasuk residivisme, faktor yang memberatkan, dan meringankan, dan kemudian mengusulkan hukuman. Seorang hakim menjelaskan sebuah proyek yang sedang dikembangkan yang akan menggunakan data prediktif dalam kasus-kasus cedera pribadi, berdasarkan keputusan pengadilan Malaysia di masa lalu yang dihasilkan oleh penerbit hukum.

Seorang hakim lainnya menunjuk pada basis data *online* putusan Indonesia yang saat ini diakses sebagai sumber data untuk pembelajaran mesin. Yang lain merujuk pada tim Kecerdasan Buatan pengadilan yang bekerja pada data hukuman.

Di Malaysia, sistem perekaman suara ke teks untuk menghasilkan transkrip secara otomatis menggunakan platform *machine learning* yang beroperasi di 320 ruang pengadilan pada akhir 2021. Responden

lain menjelaskan bahwa tidak ada cukup data yang tersedia untuk dianalisis atau digunakan untuk melatih algoritma.

Sistem *machine learning* yang digunakan dan sedang dikembangkan dikelola oleh pengadilan, meskipun dalam beberapa kasus dikembangkan secara internal dan dalam beberapa kasus lainnya oleh mitra sektor swasta. Enam puluh delapan persen mengatakan bahwa mereka belum menerima informasi yang memadai tentang sumber data atau proses *machine learning*. Hanya empat responden yang menyatakan percaya pada sumber data.

Komentar Responden Survei:

Saya percaya bahwa penilaian manusia lebih baik daripada penilaian AI berdasarkan prinsip bahwa hasil aplikasi AI sangat bergantung pada input yang disajikan dan tidak lebih.

AI berbeda dengan pemikiran manusia.

Hal ini akan menghilangkan subjektivitas dan akan mengubah peradilan menjadi mesin penyelesaian kejahatan.

Hakim dapat menjadi terlalu bergantung pada AI, independensi dan integritas dapat terpengaruh tergantung pada bagaimana data dipasok ke AI, dan kualitas keputusan/resolusi dapat terganggu.

Hakim yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi juga menjadi target orang jahat.

Mesin tidak memiliki perasaan. Akan sulit bagi mesin untuk menentukan kredibilitas, kebenaran, dan kenyataan dari kesaksian para saksi dan bukti yang diajukan.

Mungkin ada ketergantungan yang berlebihan pada AI dengan hasil bahwa pelaksanaan kebijaksanaan peradilan oleh manusia dapat disubordinasikan atau bahkan menyerah pada kemampuan dan kenyamanan AI.

AI tidak akan sebaik manusia.

Tanpa data yang lengkap, pengambilan keputusan berbasis AI mungkin kurang akurat dan tidak adil bagi para pihak.

Ketika ditanya tentang manfaat AI dan pembelajaran mesin dalam proses pengadilan, para hakim secara umum menyebutkan bahwa proses persidangan yang lebih cepat dan konsistensi dalam putusan merupakan manfaat utama bagi publik dan sistem peradilan.

Selain itu, responden menunjuk AI sebagai alat untuk melindungi hakim dari tuduhan bias, menghindari kesalahan manusia, mencapai efisiensi yang lebih besar, dan meningkatkan kapasitas pengadilan untuk mengatasi penumpukan kasus. AI dipandang oleh para hakim dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan.

Ketika mengomentari konteks tertentu, sebagian besar tanggapan peradilan berfokus pada konsistensi hukuman dan peningkatan efisiensi. Seorang hakim berkomentar bahwa AI/pembelajaran mesin tidak direncanakan di pengadilan mereka, tetapi akan menjadi aset yang bagus. Yang lain berkomentar tentang perlunya mempertahankan elemen manusia dalam menghakimi yang menghasilkan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Ketika ditanya tentang kekhawatiran mereka tentang AI, para hakim menyatakan keraguan tentang ketelitian, keakuratan, dan kecukupan data yang dimasukkan ke dalam algoritme, mengutip basis data kasus yang sudah usang sebagai dasar yang salah untuk pembelajaran mesin.

Ada juga yang menggambarkan AI sebagai 'kotak hitam' yang merusak transparansi pengadilan. Keamanan data dan algoritme itu sendiri menjadi perhatian dalam konteks peretas dan kegagalan teknologi.

Para hakim menyoroti kekhawatiran mereka tentang elemen manusia dalam menilai termasuk kerangka kerja etis, dan kekhawatiran bahwa sistem AI akan bias,

terlalu ketat, dan tidak memiliki rasa manusiawi. AI digambarkan cenderung menghasilkan keputusan yang otoriter.

Terlepas dari kekhawatiran ini, para hakim tetap tertarik untuk mengakses data atau rekomendasi berdasarkan AI dengan tetap mempertahankan otonomi untuk menerima, menolak, atau memodifikasi hasilnya.

TRANSPARANSI PENGADILAN

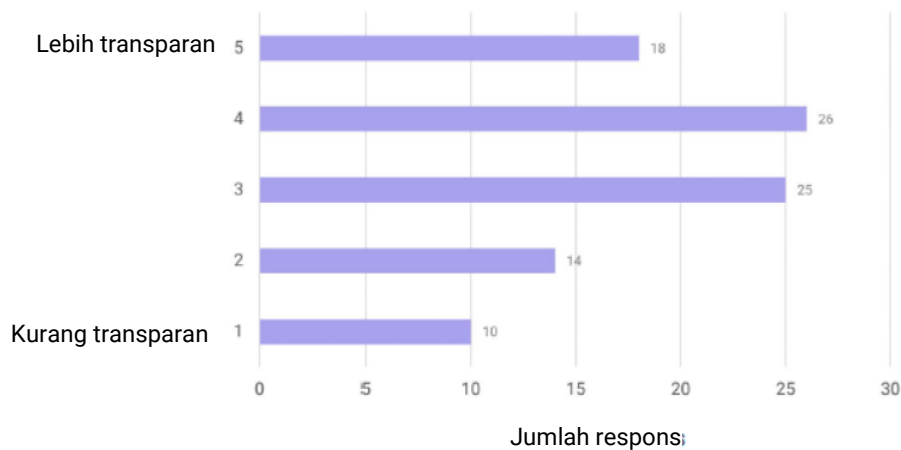
Responden survei berkomentar tentang bagaimana teknologi baru mempengaruhi akses media dan persepsi publik tentang transparansi pengadilan dan pengambilan keputusan.

Konsistensi dari jawaban survei menunjukkan bahwa teknologi baru memudahkan publik dan media untuk

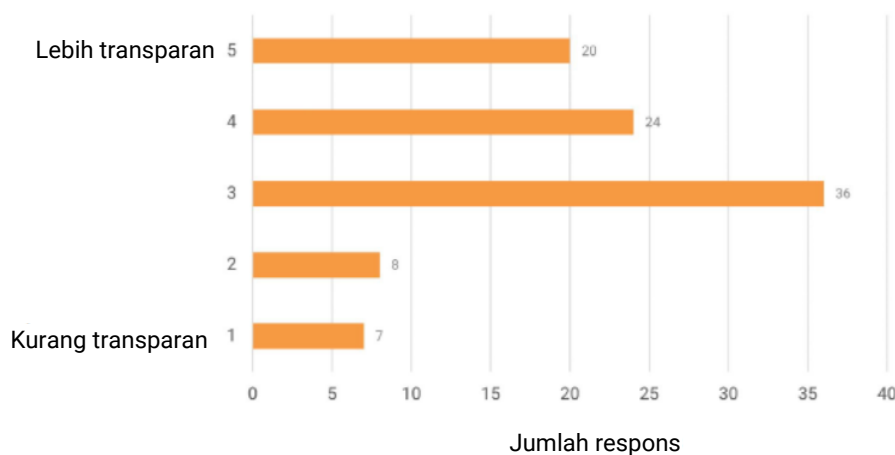
mengamati dan mempelajari proses pengadilan serta membaca dan memahami putusan pengadilan.

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat penting dan perspektif peradilan yang konsisten ini menunjukkan tren positif terhadap proses pengadilan dan pengambilan keputusan yang lebih transparan karena masyarakat lebih mampu memahami dan mempercayai keputusan pengadilan.

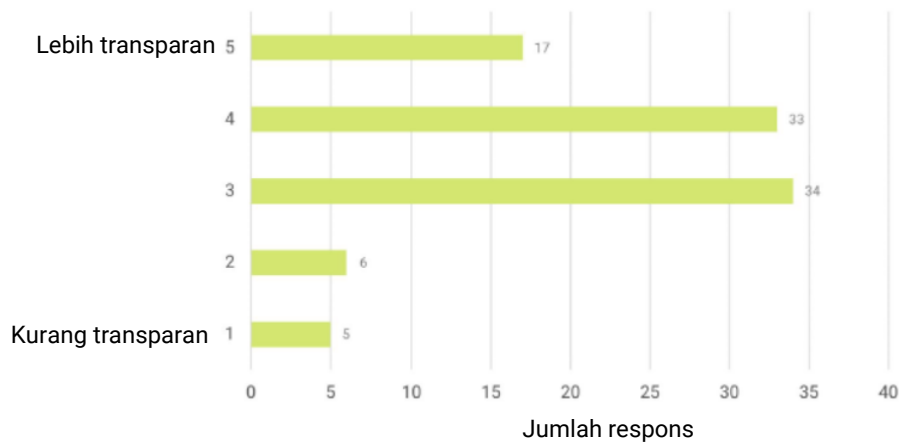
Bagaimana teknologi baru mempengaruhi akses media?



Bagaimana teknologi baru memengaruhi transparansi proses sidang?



Bagaimana teknologi baru memengaruhi transparansi putusan?



AKSES TERHADAP KEADILAN

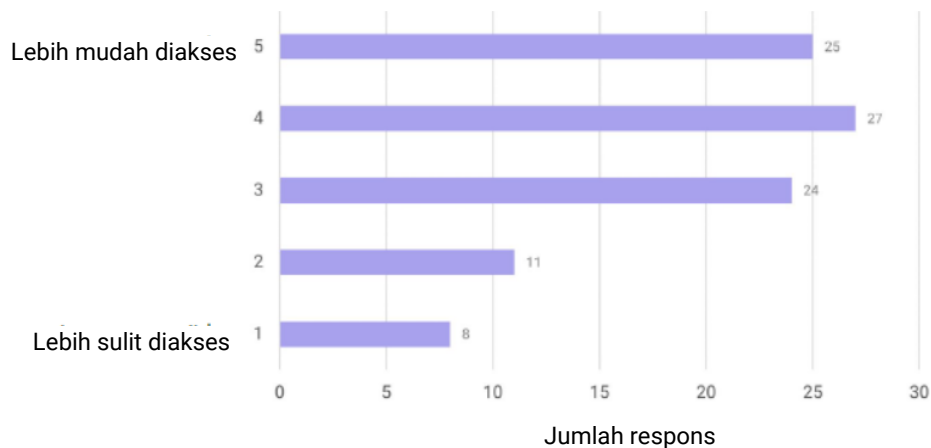
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua. UNDP berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun. Ketika mempertimbangkan teknologi baru dan perubahan dalam praktik kelembagaan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi ini mempengaruhi semua pengguna pengadilan.

Teknologi sering kali memiliki dampak positif dan negatif terhadap aksesibilitas keadilan. Proses otomatis dapat mengurangi biaya layanan hukum sehingga membuat penyelesaian hukum lebih terjangkau bagi lebih banyak orang.

Namun, perangkat dan layanan internet yang dibutuhkan berada di luar jangkauan banyak orang, baik karena kurangnya infrastruktur atau status ekonomi mereka.

Teknologi memberikan harapan besar bagi penyandang disabilitas, menawarkan cara untuk berkomunikasi secara langsung dengan hakim tanpa harus bergantung pada seseorang untuk membacakan dokumen dengan lantang atau berbicara atas nama mereka. Bagi para lansia, teknologi baru sering kali asing dan mengintimidasi. Perempuan yang menghadapi kekerasan dapat mengambil manfaat dari kemampuan untuk bersaksi dari lokasi yang jauh, meskipun akan lebih sulit bagi pengadilan untuk melindungi mereka dari paksaan atau ancaman.

Apakah teknologi baru membuat pengadilan lebih mudah diakses oleh semua orang?



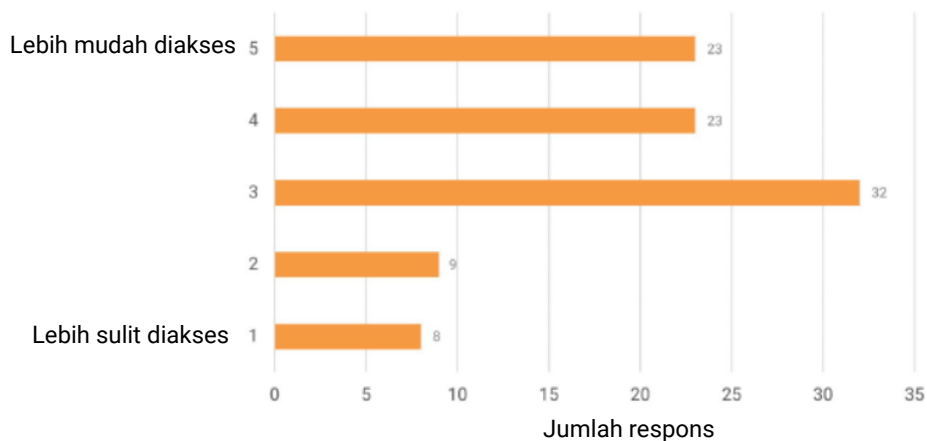
Memperhatikan akses terhadap keadilan merupakan hal yang penting di semua tahap perubahan sistem. Hakim, yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan berkomitmen terhadap kesetaraan sebagai salah satu dari enam nilai integritas peradilan, membawa perspektif yang unik dalam perencanaan teknologi baru.

Keterlibatan hakim dalam proses desain dapat membantu memastikan bahwa teknologi tidak mengaburkan data penting tentang diskriminasi gender dan ras yang sistemik.

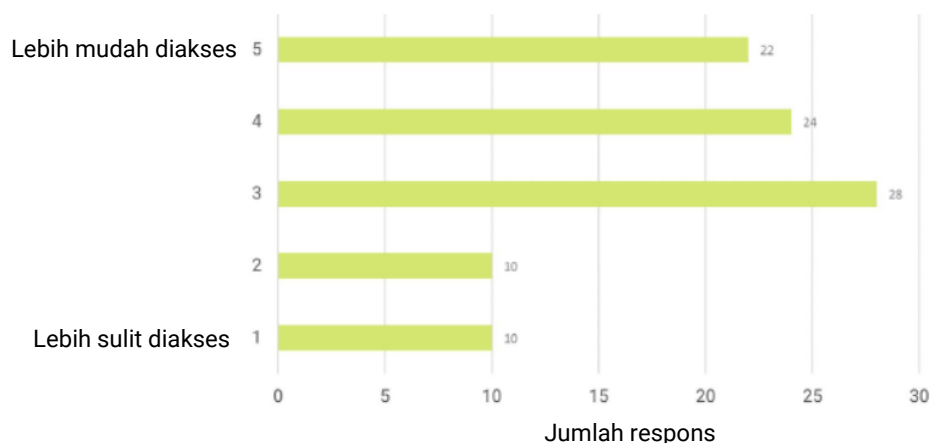
Ketika ditanya tentang dampak teknologi yang muncul terhadap akses terhadap keadilan, para hakim menekankan manfaat positif dari proses yang lebih cepat dan kemudahan pengajuan dokumen. Banyak responden mengakui bahwa persidangan virtual memudahkan orang-orang dari daerah pedesaan untuk menghadiri persidangan tanpa biaya perjalanan ke kota.

Para responden menyatakan bahwa teknologi baru meningkatkan transparansi dan membuat pengadilan lebih lincah dan responsif terhadap perubahan kebutuhan publik.

Apakah teknologi membuat pengadilan lebih mudah diakses oleh perempuan?



Apakah teknologi membuat pengadilan lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas?



Namun, para hakim mengakui bahwa teknologi baru tidak membuat pengadilan lebih mudah diakses oleh semua orang. Literasi, akses internet, dan status ekonomi masih menjadi hambatan yang cukup besar untuk menggunakan teknologi.

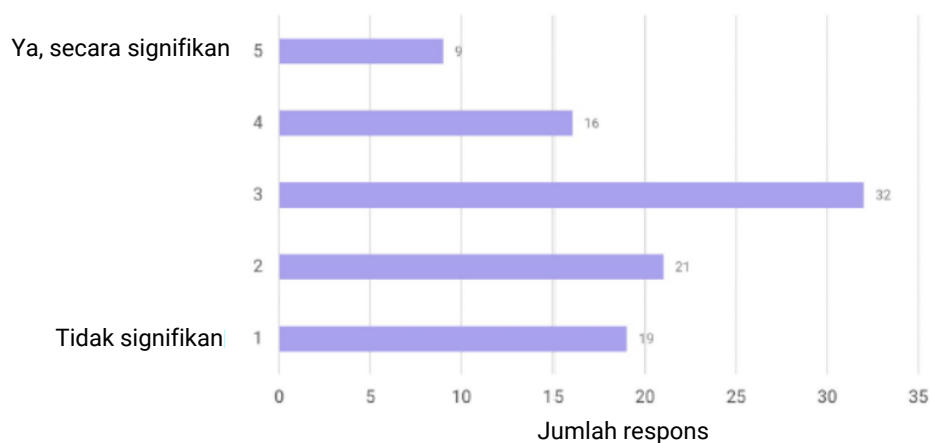
Kesenjangan dalam akses ini tetap ada, baik secara langsung maupun *online*. Contohnya: "Dalam persidangan tatap muka, ada yang tidak punya uang untuk pergi ke pengadilan. Dalam persidangan virtual, ada yang tidak memiliki akses ke ponsel atau mereka kurang paham secara teknis."

Ketika diminta untuk mengomentari masalah akses terhadap keadilan, para

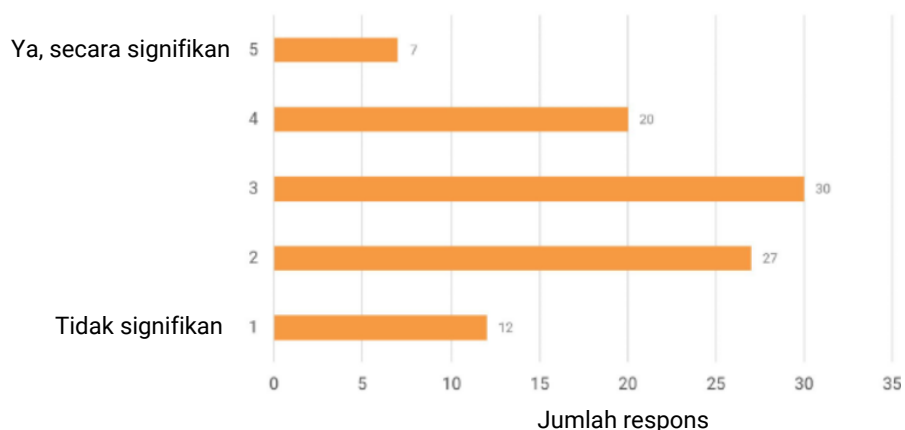
hakim menegaskan kembali dampak dari kesenjangan dalam kualitas internet dan akses terhadap teknologi. Yang lain berkomentar bahwa teknologi dapat menyebabkan berkurangnya kebutuhan akan hakim dan advokat manusia, yang mengakibatkan pendekatan yang lebih kaku dan kurang manusiawi terhadap keadilan.

Para hakim menyatakan kekhawatiran mereka tentang kerahasiaan saksi yang rentan dan anak-anak. Yang lain berkomentar tentang perlunya menilai teknologi baru secara hati-hati dan memberikan pelatihan menyeluruh kepada hakim dan staf pengadilan.

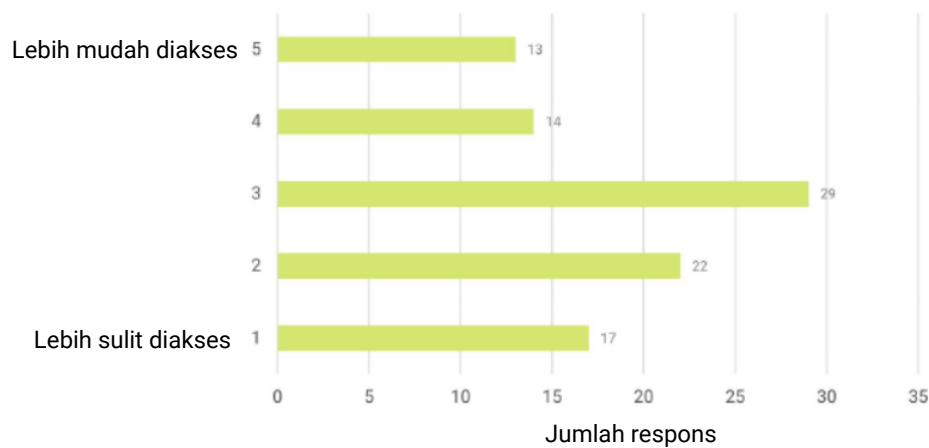
Apakah status ekonomi menjadi penghalang bagi orang-orang untuk menggunakan teknologi baru?



Apakah tingkat pendidikan menjadi penghalang bagi orang-orang untuk menggunakan teknologi baru?



Bagaimana teknologi mempengaruhi akses terhadap keadilan di daerah pedesaan?



Komentar Responden Survei:

Di masa pandemi ini ketika orang-orang yang dirampas kebebasannya secara khusus tidak dapat hadir secara pribadi di pengadilan, sidang pengadilan virtual memungkinkan mereka untuk menghadiri persidangan dalam kenyamanan dan keamanan di dalam gedung penjara; lebih sedikit pekerjaan bagi petugas penjara karena mereka tidak perlu membawa-bawa orang yang dirampas kebebasannya, yang dapat membahayakan keamanan mereka.

Aplikasi mobile secara signifikan meningkatkan akses terhadap keadilan. Masyarakat dapat mengakses informasi, menghadiri sidang virtual, membayar denda atas pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana, membayar uang jaminan, membayar biaya pengarsipan, dan sebagainya melalui ponsel pintar dari mana saja dan kapan saja.

Lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dalam proses pengadilan

Lebih transparan karena setelah dokumen diunggah ke dalam sistem, tidak ada kemungkinan dokumen tersebut hilang atau diubah setelah diajukan.

Teknologi memungkinkan pengguna pengadilan untuk meminta/menerima data/informasi dari pengadilan dengan cepat.

Teknologi dapat dipalsukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama pada dokumen.

Masyarakat miskin dan yang buta huruf komputer mungkin akan merasa kesulitan dengan teknologi baru.

Transparansi, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap peradilan, menghemat waktu bagi pihak yang berperkara dan praktis.

Selama ada keinginan untuk mempelajari hal-hal baru, menyesuaikan dan beradaptasi dengan praktik-praktik baru yang muncul, memiliki pikiran yang terbuka, fleksibilitas - tidak akan ada banyak masalah.

Teknologi harus dipertahankan dan diintegrasikan setelah pandemi dan tidak dibuang ketika kita kembali ke "normal" karena kita telah merasakan manfaat teknologi dalam administrasi peradilan.

Platform yang digunakan harus stabil, dapat diakses, dan dapat diandalkan. Platform tersebut harus mudah digunakan oleh semua pemangku kepentingan, tanpa memandang kekayaan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, atau afiliasi.

PRIVASI / PERLINDUNGAN DATA

Sebagian besar responden tidak terbiasa dengan rincian kontrol privasi dan data, namun mereka sadar bahwa pengadilan atau departemen TI mereka memiliki protokol. Sistem *online* dilindungi kata sandi dengan tingkat akses yang berbeda untuk berbagai jenis pengguna.

Ada kekhawatiran umum tentang peretasan dan keamanan data pribadi, namun sebagian besar hakim mengindikasikan bahwa pengadilan dan pemerintah menerapkan perlindungan termasuk audit rutin, riwayat *log*, dan strategi manajemen risiko. Pengadilan secara aktif terlibat dengan penyedia layanan teknologi dan menuntut transparansi dalam prosedur penanganan data.

Dalam kasus-kasus di mana identitas saksi perlu dilindungi, teknologi menawarkan cara-cara tambahan untuk memastikan bahwa saksi anak yang rentan tidak perlu bersaksi di depan umum. Beberapa pengadilan memiliki sistem yang aman dan terpisah untuk data pengadilan dengan kontrol internal untuk akses dan penyimpanan. Beberapa pengadilan lainnya hanya memperbolehkan peserta sidang untuk mengaksesnya secara *online*, sehingga membatasi akses publik ke pengadilan, namun tetap menjamin privasi saksi dan pihak yang berperkara. Beberapa kasus hanya mengizinkan pengacara untuk mengakses ruang sidang virtual.

Ketika ditanya apakah hakim menerima informasi yang memadai tentang data dan

perlindungan privasi dari teknologi pengadilan, 51% responden mengatakan tidak. Empat puluh satu persen melaporkan bahwa penyedia teknologi sektor swasta memiliki akses ke data pengadilan untuk alasan teknis atau untuk menyimpan file pengadilan. Sebanyak 22% lainnya tidak mengetahui apakah penyedia sektor swasta memiliki akses dan 35% melaporkan bahwa tidak ada pihak swasta yang dapat mengakses konten berkas pengadilan ketika memberikan dukungan teknis. Para hakim menyatakan kekhawatiran terhadap protokol untuk membatasi akses ini.

KOMENTAR UMUM

Responden diundang untuk memberikan komentar umum tentang teknologi yang sedang berkembang. Banyak yang mengulangi komentar yang telah disampaikan pada survei sebelumnya, mengekspresikan antusiasme mereka terhadap teknologi yang dapat meningkatkan akses publik terhadap keadilan, sambil menyuarakan kekhawatiran berdasarkan pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana teknologi akan berdampak pada transparansi pengadilan.

Para hakim mengakui bahwa dalam hal perilaku dan integritas peradilan, teknologi menghadirkan tantangan baru untuk memastikan akurasi dan cakupan bukti yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Para hakim akan terus membawa standar etika mereka yang tinggi untuk perubahan-perubahan dalam menjalankan pengadilan.

Komentar Responden Survei:

Sistem ini meningkatkan integritas peradilan karena sifat dari sistem itu sendiri. Semakin sedikit campur tangan manusia, semakin baik. Sejujurnya, teknologi memperkuat integritas peradilan secara keseluruhan.

Integritas peradilan pertama-tama dan terutama adalah tentang karakter setiap anggota peradilan. Kejujuran, dedikasi, kerendahan hati, komitmen, hati yang bersih, hasrat yang tulus untuk melayani, dan pikiran yang tidak tercemar. Meskipun teknologi dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses peradilan, integritas para hakim dan pegawai pengadilanlah yang paling penting. Segala sesuatu yang lain akan mengikuti.

Teknologi adalah cara yang efektif untuk menghemat waktu dan biaya dan tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim.

Harus ada program pelatihan untuk mentransfer pengetahuan tentang penggunaan teknologi baru kepada para hakim di seluruh negeri.

Mengingat cepatnya perkembangan teknologi dan integritas peradilan, sistem yang ada saat ini perlu mengejar ketertinggalan dan kita perlu memikirkan kembali bagaimana kita dapat mengatasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang ada dalam hal pelatihan personil, infrastruktur, pemrosesan kasus, dan digitalisasi catatan pengadilan. Namun, semua itu harus dilakukan dengan mengadopsi teknologi baru yang terbukti anti peretasan demi menjaga kepercayaan publik terhadap kemampuan pengadilan untuk mengadili perkara dengan cara yang tidak memihak.

Saya adalah salah satu hakim yang mengalami kesulitan dalam hal teknologi. Akan sangat membantu jika dilakukan webinar untuk meningkatkan kapasitas kami dan bahwa personil TI tersedia untuk melengkapi staf pengadilan yang ada.

Teknologi adalah cara yang efektif untuk menghemat waktu dan biaya dan tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim.

Harus ada program pelatihan untuk mentransfer pengetahuan tentang penggunaan teknologi baru kepada para hakim di seluruh negeri.

Kesimpulan

Data survei ini mengungkapkan urgensi partisipasi peradilan dalam pengambilan keputusan tentang teknologi yang digunakan di pengadilan mereka. Teknologi sudah digunakan, atau dalam pengembangan pada tingkat yang berbeda di setiap negara - bahkan di dalam setiap negara. Tanpa masukan dari peradilan secara aktif, teknologi ini dapat melanggengkan ketidaksetaraan, mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan, dan mengaburkan informasi penting yang dibutuhkan hakim untuk membuat keputusan yang independen dan transparan.

Teknologi yang sedang berkembang diperkenalkan kepada para hakim, bukan dipimpin oleh para hakim. Hakim biasanya tidak dilibatkan dalam desain, pemilihan, dan implementasi teknologi baru. Para hakim berkomentar tentang terbatasnya akses mereka terhadap informasi mengenai siapa yang menyediakan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut bekerja.

Para hakim menyatakan kekhawatiran mereka bahwa aspek-aspek dari proses persidangan, yang dulunya berada di bawah kendali mereka, sekarang disembunyikan oleh teknologi. Mereka tidak yakin dengan kebenaran dokumen yang diterima secara elektronik atau keamanan sidang *online*. Keraguan mereka tentang pembelajaran mesin mengungkapkan bagaimana teknologi yang kompleks ini mengaburkan bagian-bagian dari proses pengambilan keputusan. Namun, terlepas dari kekhawatiran ini, responden survei menyatakan optimisme mereka tentang bagaimana teknologi baru akan meningkatkan transparansi, melindungi

dari korupsi, dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Pandemi telah menunjukkan kurangnya persiapan di seluruh sistem peradilan untuk menghadapi gangguan berskala besar. Partisipasi aktif dalam perubahan teknologi akan memastikan bahwa para hakim siap menghadapi peristiwa lokal dan global di masa depan, dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat.

Perhatian terhadap komponen-komponen integritas peradilan sangat penting untuk menumbuhkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Integritas peradilan, terutama merupakan ukuran individu hakim, didasarkan pada kemampuan hakim untuk melindungi ruang sidang dan proses dari pengaruh yang tidak semestinya. Hakim memantau bukti dan interaksi, memastikan bahwa tidak ada pengaruh dan tidak ada persepsi pengaruh.

Desain dan pengembangan teknologi biasanya menggunakan proses berulang di mana setiap perubahan dimonitor, dievaluasi, dan ditingkatkan dalam siklus yang berkelanjutan. Praktik desain berulang ini bertentangan dengan tradisi otonomi peradilan. Banyak hakim menolak untuk melacak hasil kasus mereka atau pengawasan proses pengadilan mereka. Untuk menghilangkan peluang korupsi dan mengejar kesetaraan akses, pemantauan dan evaluasi harus menjadi bagian dari budaya peradilan, tanpa mengganggu independensi peradilan. Hal ini akan memungkinkan para hakim untuk secara aktif terlibat dalam perancangan sistem pengadilan.

Beberapa komentar responden menunjukkan ketidakpastian, sementara

yang lain menunjukkan antusiasme atau keengganan. Beberapa hakim merasa nyaman atau ingin menggunakan teknologi baru dan yang lain merasa gugup atau menolak. Para hakim harus diberikan pelatihan dan paparan terhadap teknologi baru untuk memungkinkan tidak hanya penggunaan teknologi ini tetapi juga partisipasi mereka dalam merancang proses pengadilan yang baru.

Meskipun hakim tidak memiliki tanggung jawab utama untuk aspek teknis dari proses pengadilan, mereka harus tetap aktif dalam pengembangan dan pemantauan teknologi ini sehingga mereka dapat membawa keahlian yudisial mereka ke dalam proses desain dan dapat mengidentifikasi risiko terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Otonomi pengadilan dari pemerintah tetaplah penting untuk menjaga independensi peradilan dan melindungi supremasi hukum.

Pemerintah sering muncul di pengadilan sebagai pihak yang berperkara, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Kontrol pemerintah atas teknologi pengadilan dapat merusak kepercayaan publik bahwa hakim membuat keputusan yang independen.

Ketika teknologi mengubah pelaksanaan pengadilan, para hakim harus dilengkapi untuk berpartisipasi dalam evolusi keadilan. Mereka harus memiliki pemahaman dasar tentang teknologi dan kosakata serta kapasitas untuk mengidentifikasi ketika teknologi mempengaruhi keadilan pengadilan dan memastikan kesetaraan akses dalam platform teknologi.

Hakim memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna pengadilan, terutama pengguna yang rentan. Ketika teknologi baru mendorong transparansi dan efisiensi, hakim adalah orang-orang yang akan memastikan bahwa

individu di pengadilan mereka tidak tertinggal.

Teknologi baru, yang secara historis dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas pengguna yang melek huruf, melek teknologi, dan berpenghasilan menengah, tidak tersedia untuk semua perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas bahasa. Teknologi baru tidak hanya harus melindungi, tetapi juga meningkatkan kesetaraan gender dan memerangi diskriminasi. Tanpa partisipasi aktif dari lembaga peradilan, kebutuhan pengguna yang paling rentan akan terabaikan dalam proses desain.

Berdasarkan potret perspektif peradilan dari kawasan ASEAN ini, jelas bahwa hakim dapat membawa keahlian mereka ke dalam proses perancangan teknologi. Untuk mendukung para hakim mengambil peran kepemimpinan dalam evolusi pengadilan, baik dalam peran administratif senior, pengadilan banding, atau di tingkat pengadilan pedesaan, para hakim akan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan bagi para hakim untuk

- Memahami pembelajaran mesin/kecerdasan buatan dengan cukup baik untuk mengajukan pertanyaan tentang data yang digunakan untuk melatih algoritme dan mengidentifikasi bias berbasis gender, ras dan identitas dalam proses pembelajaran mesin
- Menerima pengarahan terperinci tentang ruang lingkup dan jangkauan keputusan yang digunakan untuk melatih sistem AI
- Berpartisipasi dalam mempersiapkan pihak yang berperkara dan saksi untuk proses pengadilan virtual, kesopanan, dan teknologi, sebelum berpartisipasi dalam pengadilan *online*

- Meningkatkan aturan hukum dan kriteria keadilan persidangan ketika teknologi baru diusulkan, menegaskan peran yudisial mereka untuk melindungi prinsip-prinsip utama ini
- Meneliti bukti dan kesaksian saksi yang disajikan melalui teknologi baru
- Mempromosikan pemahaman tentang proses pengadilan dengan pihak-pihak yang berperkara dan saksi untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan publik, seiring dengan perkembangan proses
- Mendukung rekan-rekan peradilan untuk membangun keterampilan dan pemahaman tentang teknologi baru yang diperlukan untuk mempertahankan beban kasus mereka dan beradaptasi dengan perubahan teknologi
- Mempertahankan perhatian yang ketat terhadap peluang korupsi oleh rekan-rekan sejawat dan staf pengadilan baik dalam proses pengadilan tradisional maupun teknologi

Tanpa partisipasi aktif peradilan dalam evolusi teknologi dalam pelaksanaan pengadilan di ASEAN, ada risiko bahwa krisis hukum pribadi masyarakat akan menjadi tempat pelanggaran hak-hak individu dan pelanggaran privasi.

Mengaburkan bukti dan proses pengambilan keputusan melalui teknologi yang tidak dapat dijelaskan oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara akan mengikis transparansi dan kepercayaan publik. Menyerahkan keadilan pengadilan kepada perusahaan teknologi swasta atau perancang sistem yang ditugaskan untuk mencapai efisiensi akan merusak transparansi pengadilan.

Mengikuti perkembangan teknologi dan membawa aturan hukum dan keadilan

persidangan ke dalam desain proses pengadilan yang baru adalah salah satu kewajiban hakim dan penting untuk menjaga integritas peradilan.



United Nations Development Programme
Bangkok Regional Hub
3rd Floor United Nations Service Building
Rajdamnern Nok Avenue, Phranakorn
Bangkok 10200 Thailand

www.asia-pacific.undp.org